

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

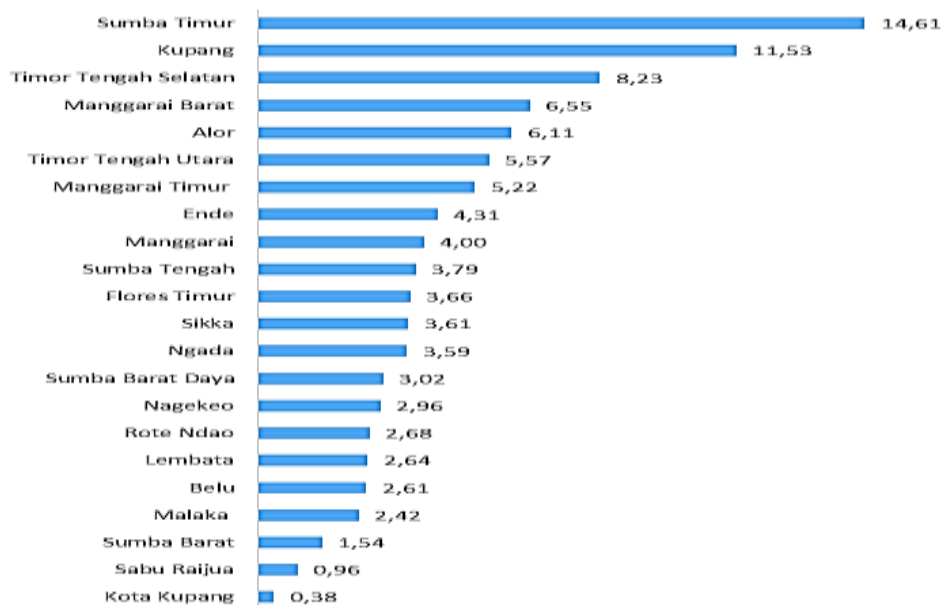
Dasar dari pembangunan ekonomi adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin fasilitas-fasilitas publik yang dapat meningkatkan perekonomian. Fasilitas publik yang paling mendasar dan banyak di butuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian yakni fasilitas akan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi. Fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penyediaan sekolah, kemudian fasilitas kesehatan dapat dilihat dari penyediaan layanan kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagainya, serta fasilitas infrastruktur transportasi dilihat dari penyediaan jalan yang dapat menghubungkan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Tanpa adanya infrastruktur transportasi maka masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan perekonomian lainnya. Masyarakat tidak dapat terlepas dari ketiga fasilitas dasar tersebut. Apabila fasilitas tersebut telah dapat terpenuhi dengan baik maka masyarakat dengan sendirinya akan sejahtera dan perekonomian daerah pun akan meningkat.

Pemenuhan fasilitas dasar publik yakni fasilitas akan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi pada daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian, akan berarti apabila diikuti dengan pemerataan fasilitas-fasilitas tersebut. Apabila terjadi sebaliknya, dimana tidak

adanya pemerataan dalam pemenuhan fasilitas tersebut maka akan berdampak pada kesenjangan fasilitas antar daerah.

Kesenjangan fasilitas daerah merupakan perbedaan performa ekonomi dan penyediaan fasilitas publik serta kesejahteraan antar daerah, dimana terdapat daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Dalam penelitian ini, kesenjangan fasilitas daerah yang digunakan yakni kesenjangan fasilitas daerah berupa fasilitas pendidikan yang mana dilihat dari jumlah sekolah, fasilitas kesehatan dilihat dari jumlah rumah sakit umum daerah, puskesmas dan klinik/balai kesehatan dan fasilitas infrastruktur transportasi dilihat dari panjang jalan kabupaten (km). Suatu daerah dapat diukur tingkat kesenjangan dalam hal ini kesenjangan fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi apabila memiliki luas daerah yang sama tetapi pembangunan dan penyediaan fasilitas di daerah tersebut berbeda. Oleh karena itu, peneliti mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data luas wilayah sebagai ukuran awal kesenjangan fasilitas antar daerah di kabupaten/kota di provinsi NTT. Berikut data persentase luas daerah menurut kabupaten/kota di provinsi NTT, tahun 2018.

Grafik 1.1  
 Persentase Luas Daerah Menurut Kabupaten/Kota  
 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018

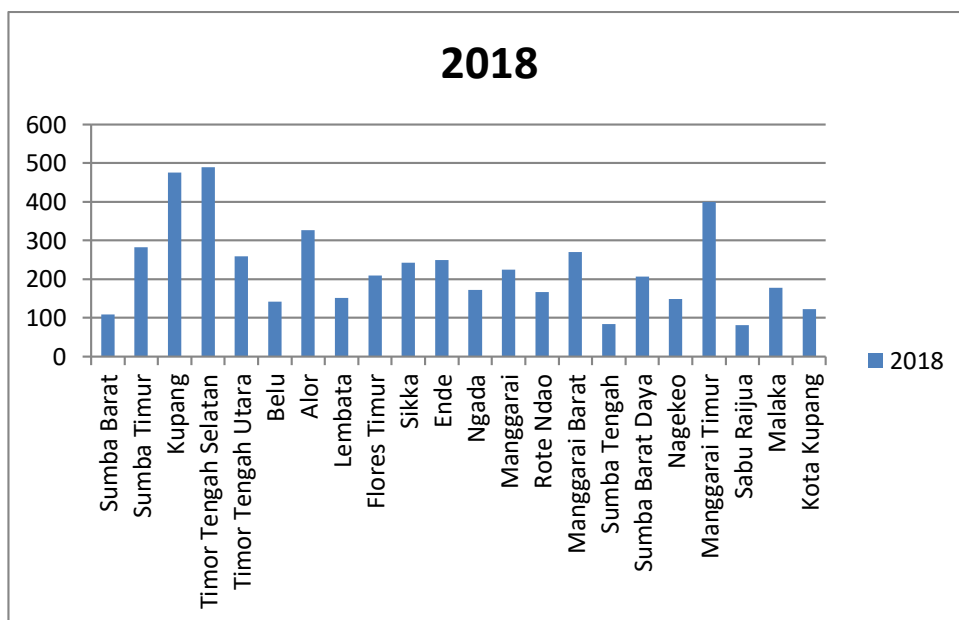


Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa luas masing-masing kabupaten/kota di provinsi NTT beragam dan terdapat beberapa daerah yang memiliki luas daerah yang sama. Daerah yang memiliki luas daerah yang sama yakni kabupaten Manggarai dan Alor sebesar 6%, kabupaten Timor Tengah Utara dan Manggarai Timur sebesar 5%, kabupaten Ende dan Manggarai sebesar 4%, kabupaten Sumba Tengah, Flores Timur, Sikka, Ngada, dan Sumba Barat Daya sebesar 3%, kemudian kabupaten Nagekeo, Rote Ndao, Lembata, Belu dan Malaka sebesar 2%, dan yang terakhir Kabupaten Sabu dan Kota Kupang sebesar 0,6%. Selanjutnya dari luas daerah yang sama, dapat dilihat tingkat kesenjangan fasilitas antar daerah dilihat dari fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi.

Fasilitas pendidikan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan jumlah sekolah di kabupaten/kota Provinsi NTT yang termasuk didalamnya jumlah sekolah negeri untuk tingkat dasar (TK dan SD) dan tingkat menengah (SMP) dan tingkat atas (SMA dan SMK) tahun 2018 yang peneliti peroleh dari BPS (Grafik 1.2) menunjukkan bahwa jumlah fasilitas sekolah di kabupaten/kota Provinsi NTT masih fluktuatif dan menunjukan angka yang timpang, terkhusus bagi kabupaten/kota yang memiliki luas daerah yang sama. Pada kabupaten Timor Tengah Utara dan Manggarai Timur yang memiliki luas daerah sebesar 5%, jumlah fasilitas sekolah tahun 2018 menunjukkan bahwa di kabupaten Manggarai Timur lebih tinggi sebesar 400 fasilitas sekolah dibandingkan kabupaten Timor Tengah Utara yang hanya sebesar 259 fasilitas sekolah. Selain itu pada kabupaten Sumba Tengah, Flores Timur, Sikka, Ngada, dan Sumba Barat Daya yang memiliki luas daerah sebesar 3%, jumlah fasilitas sekolah tahun 2018 menunjukkan bahwa pada kabupaten Sikka lebih tinggi sebesar 242 sekolah, kemudian diikuti kabupaten Flores Timur sebesar 209 sekolah, kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 206 sekolah, kabupaten Ngada sebesar 172 sekolah, dan yang terendah pada kabupaten Sumba Tengah sebesar 84 sekolah. Kemudian kabupaten Nagekeo, Rote Ndao, Lembata, Belu dan Malaka yang memiliki luas daerah sebesar 2%, jumlah fasilitas sekolah tahun 2018 menunjukkan bahwa pada kabupaten Malaka dan Rote Ndao lebih tinggi sebesar 178 dan 166 sekolah, lalu di ikuti kabupaten Lembata sebesar 152 sekolah, kabupaten Nagekeo sebesar 148 sekolah, dan terendah pada kabupaten Belu sebesar 142 sekolah. Dan yang terakhir Kabupaten Sabu

Raijua dan Kota Kupang yang memiliki luas daerah rata-rata sebesar 0,6%, jumlah fasilitas sekolah tahun 2018 menunjukkan bahwa pada Kota Kupang lebih tinggi sebesar 122 sekolah dibandingkan pada kabupaten Sabu Raijua yang hanya sebesar 81 sekolah. Berikut grafik jumlah fasilitas sekolah menurut kabupaten/kota di provinsi NTT tahun 2018.

Grafik 1.2  
Jumlah Fasilitas Sekolah Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

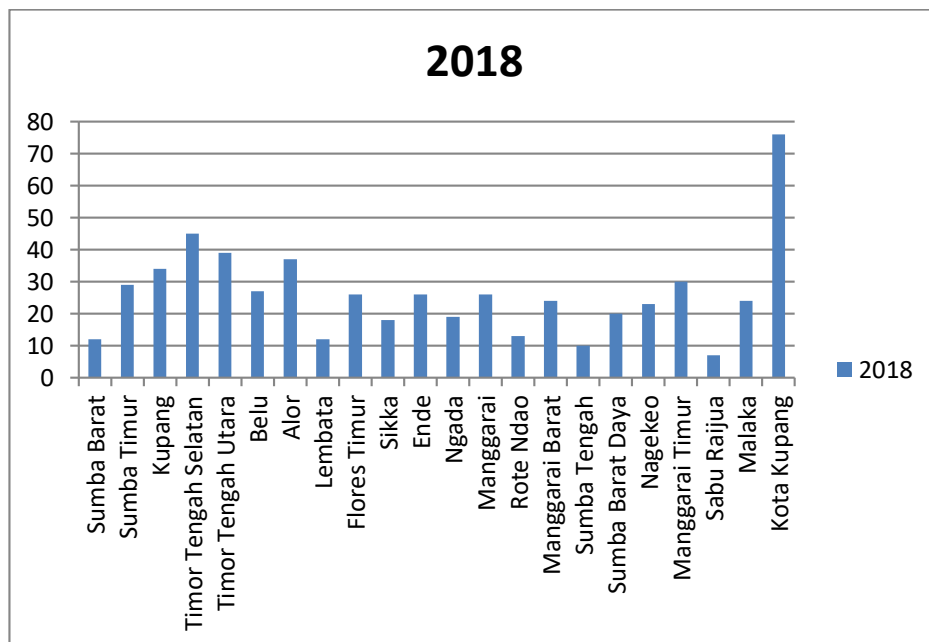
Selain pembangunan serta penyediaan fasilitas di bidang pendidikan, indikator kedua yang dapat menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesenjangan fasilitas daerah adalah kesehatan. Fasilitas kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat beraktivitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu, perlunya pemerhatian dalam penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sehingga

tercipta masyarakat yang sehat dan sejahtera. Penyediaan fasilitas kesehatan di daerah-daerah dapat dilihat dari adanya pembangunan rumah sakit umum daerah, puskesmas, klinik/balai kesehatan, dan pelayanan kesehatan lainnya.

Untuk melihat kesenjangan fasilitas kesehatan antar daerah perlu dilihat luas daerahnya terlebih dahulu, sama seperti pada fasilitas pendidikan. Fasilitas kesehatan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan jumlah rumah sakit umum daerah, puskesmas, dan klinik/balai kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi NTT tahun 2018. Data fasilitas kesehatan tersebut peneliti peroleh dari BPS. Berdasarkan data yang telah diperoleh (Grafik 1.3) menunjukkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan di kabupaten/kota Provinsi NTT masih fluktuatif dan menunjukkan angka yang timpang, terkhusus bagi kabupaten/kota yang memiliki luas daerah yang sama. Pada kabupaten Manggarai Barat dan Alor yang memiliki luas daerah 6%, jumlah fasilitas kesehatan dari tahun 2018 menunjukkan bahwa di kabupaten Alor lebih tinggi sebesar 37 fasilitas kesehatan dibandingkan kabupaten Manggarai Barat yang hanya sebesar 24 fasilitas kesehatan. Kemudian pada kabupaten Sumba Tengah, Flores Timur, Sikka, Ngada, dan Sumba Barat Daya yang memiliki luas daerah sebesar 3%, jumlah fasilitas kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa pada kabupaten Flores Timur lebih tinggi sebesar 26 fasilitas kesehatan, kemudian kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 20 fasilitas kesehatan, kabupaten Ngada sebesar 19 fasilitas kesehatan kemudian di ikuti kabupaten Sikka sebesar 18 fasilitas kesehatan dan terendah pada kabupaten Sumba Tengah sebesar 10 fasilitas kesehatan. Kemudian kabupaten Nagekeo, Rote Ndao, Lembata, Belu dan

Malaka yang memiliki luas daerah sebesar 2%, jumlah fasilitas kesehatan tahun 2017 menunjukkan bahwa pada kabupaten Belu lebih tinggi sebesar 27 fasilitas kesehatan, lalu di ikuti kabupaten Malaka sebesar 24 fasilitas kesehatan, kabupaten Nagekeo sebesar 23 fasilitas kesehatan, kabupaten Rote Ndao sebesar 13 fasilitas kesehatan, dan terendah pada kabupaten Lembata sebesar 12 fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir Kabupaten Sabu Raijua dan Kota Kupang yang memiliki luas daerah rata-rata sebesar 0,6%, jumlah fasilitas kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa pada Kota Kupang lebih tinggi sebesar 76 fasilitas kesehatan dibandingkan pada kabupaten Sabu Raijua yang hanya sebesar 7 fasilitas kesehatan. Berikut grafik jumlah fasilitas kesehatan menurut kabupaten/kota di provinsi NTT tahun 2018.

Grafik 1.3  
 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota  
 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

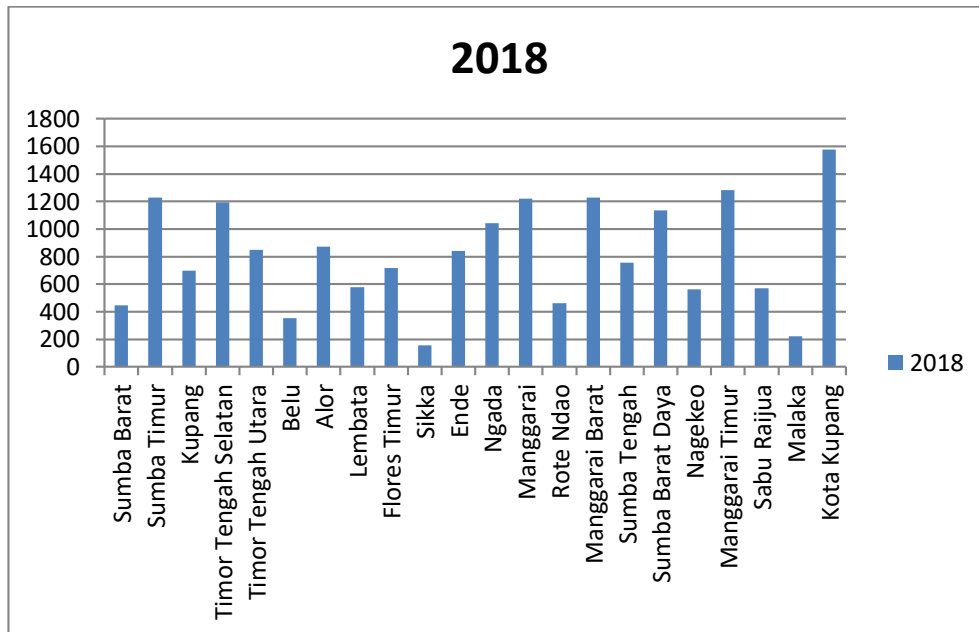
Indikator ketiga yang dapat menjadi tolak ukur dalam menggambarkan kesenjangan fasilitas daerah adalah infrastruktur transportasi. Fasilitas infrastruktur transportasi adalah kebutuhan yang juga mendasar bagi masyarakat. Masyarakat tidak akan dapat bersekolah dan melakukan pengobatan apabila tidak didukung dengan infrastruktur transportasi yang memadai. Dan juga penyediaan fasilitas infrastruktur transportasi yang baik dapat memperlancar kegiatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlunya pemerhatian dalam penyediaan fasilitas infrastruktur transportasi bagi masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera dan sehat. Penyediaan fasilitas infrastruktur transportasi di daerah-daerah dapat dilihat dari adanya pembangunan jalan untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lain. Untuk melihat kesenjangan fasilitas infrastruktur transportasi antar daerah perlu dilihat luas daerahnya terlebih dahulu, sama seperti pada fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Dalam penelitian ini fasilitas infrastruktur transportasi dilihat berdasarkan panjang jalan kabupaten (km) pada kabupaten/kota di Povinsi NTT tahun 2018. Data fasilitas infrastruktur transportasi tersebut peneliti peroleh dari BPS. Berdasarkan data yang telah diperoleh (Grafik 1.4) menunjukkan bahwa jumlah fasilitas infrastruktur transportasi berupa jalan di kabupaten/kota Provinsi NTT masih fluktuatif dan menunjukkan angka yang timpang, terkhusus bagi kabupaten/kota yang memiliki luas daerah yang sama. Pada kabupaten Timor Tengah Utara dan Manggarai Timur yang memiliki luas daerah sebesar 5%, jumlah fasilitas infrastruktur transportasi jalan tahun 2018 menunjukkan bahwa kabupaten



Manggarai Timur memiliki fasilitas infrastruktur transportasi jalan lebih tinggi yakni sepanjang 1.281.291 km dari kabupaten Timor Tengah Utara yang memiliki fasilitas jalan hanya sepanjang 848,85 km. Kemudian kabupaten Ende dan Manggarai yang memiliki luas daerah sebesar 4%, jumlah fasilitas infrastruktur transportasi jalan tahun 2018 menunjukkan bahwa kabupaten Manggarai memiliki fasilitas jalan lebih tinggi yakni sepanjang 1.218,83 km dari kabupaten Ende yang hanya memiliki fasilitas jalan sepanjang 842,6 km. Lalu pada kabupaten Sumba Tengah, Flores Timur, Sikka, Ngada, dan Sumba Barat Daya yang memiliki luas daerah sebesar 3%, jumlah fasilitas infrastruktur transportasi jalan tahun 2018 menunjukkan bahwa pada kabupaten Sumba Barat Daya lebih tinggi sebesar 1.136,31 km, kemudian di ikuti kabupaten Ngada sebesar 1.042 km, kabupaten Sumba Tengah sebesar 754 km, kabupaten Flores Timur sebesar 718,18 km, dan terendah pada kabupaten Sikka sebesar 156,5 km. Kemudian kabupaten Nagekeo, Rote Ndao, Lembata, Belu dan Malaka yang memiliki luas daerah sebesar 2%, jumlah fasilitas infrastruktur transportasi jalan tahun 2018 menunjukkan bahwa pada kabupaten Lembata lebih tinggi sepanjang 577,03 km, lalu di ikuti kabupaten Nagekeo sepanjang 564,23 km, kabupaten Rote Ndao sepanjang 459,83 km, kabupaten Belu sepanjang 353,02 km, dan terendah pada kabupaten Malaka sepanjang 221,08 km. Dan yang terakhir Kabupaten Sabu Raijua dan Kota Kupang yang memiliki luas daerah rata-rata sebesar 0,6%, jumlah fasilitas infrastruktur transportasi tahun 2018 menunjukkan bahwa pada Kota Kupang lebih tinggi sepanjang 1.574,79 km dibandingkan

pada kabupaten Sabu Raijua yang hanya sepanjang 57,5 km. Berikut grafik jumlah fasilitas infrastruktur transportasi jalan kabupaten menurut kabupaten/kota di provinsi NTT tahun 2018.

Grafik 1.4  
Jumlah Fasilitas Infrastruktur Transportasi Jalan Kabupaten  
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Ketidakseimbangan pembangunan serta penyediaan fasilitas dasar masyarakat akan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi dapat menjadi acuan pemerintah dalam mengalokasi dana dalam bentuk belanja modal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja modal juga merupakan salah satu cara untuk

mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi dan sarana penunjang lainnya.

Hal inilah yang mempengaruhi adanya pengalokasian dana dalam bentuk belanja modal. Sehingga saat fasilitas dasar masyarakat sudah terpenuhi maka dengan sendirinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hasil pembangunan daerah dapat dirasakan, dan dampak jangka panjangnya yakni kesenjangan fasilitas antar daerah akan semakin berkurang. Apabila kesenjangan fasilitas daerah semakin tinggi maka alokasi belanja modal pun harus semakin tinggi. Dan apabila kesenjangan fasilitas daerah semakin rendah maka pengalokasian dana dalam bentuk belanja modal akan ikut rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kesenjangan Fasilitas Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pembangunan fasilitas dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan

fasilitas antar daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam terkait pengaruh kesejangan fasilitas daerah terhadap pengalokasian belanja modal untuk pembangunan fasilitas dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi sehingga dapat diketahui apakah kesenjangan fasilitas daerah dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesenjangan fasilitas daerah dibidang pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018?
2. Apakah kesenjangan fasilitas daerah dibidang kesehatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018?
3. Apakah kesenjangan fasilitas daerah dibidang infrastruktur transportasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018?
4. Apakah kesenjangan fasilitas daerah dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial, pengaruh kesenjangan fasilitas daerah dibidang pendidikan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial, pengaruh kesenjangan fasilitas daerah dibidang kesehatan terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial, pengaruh kesenjangan fasilitas daerah dibidang infrastruktur transportasi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan, pengaruh kesenjangan fasilitas daerah dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi terhadap alokasi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai kesenjangan fasilitas daerah dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi serta memperoleh kesempatan menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat selama perkuliahan dalam berbagai bidang dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap permasalahan kesenjangan fasilitas daerah dibidang pendidikan, kesehatan dan

infrastruktur transportasi yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk mendalami permasalahan kesenjangan fasilitas daerah dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.